



Lampu Hijau Danaais untuk Penanganan Covid-19

JOGJA-Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan memperbolehkan Pemda DIY memanfaatkan Dana Keistimewaan (Danais) untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Nugroho Nurcahyo & Yosef Leon
redaksi@harianjogja.com

► Ketua Paguyuban Dukuh se-DIY, Sukiman Hadiwijaya, menyambut gembira turunnya beleid dari Kementerian Keuangan.

► Pemda DIY diminta segera mengonsultasikan petunjuk teknis ke KPK.

Kebijakan itu tertuang dalam surat Direktorat Perimbangan Keuangan Kemenkeu yang ditujukan kepada Gubernur DIY dengan nomor S121/PK/2021 tertanggal 10 Juli

2021, perihal penggunaan Dana Keistimewaan DIY untuk Penanganan Covid-19 DIY. Ketua Paguyuban Dukuh se-DIY, Sukiman Hadiwijaya, menyambut gembira turunnya

beleid dari Kementerian Keuangan yang memberi lampu hijau penggunaan Danais untuk penanganan pandemi. "Yang selama ini kami diskusikan sesama dukuh, akhirnya terjawab," kata dia melalui sambungan seluler Minggu (11/7).

Ia berharap danais selanjutnya bisa menyebar hingga tingkat RT/RW di tengah situasi kasus Covid-19 yang kian

menyebar ke dusun-dusun dan pertumbuhan kasusnya yang eksponensial. Sebelum itu, tentunya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Danais yang selama ini terkotak-kotak dalam lima pilar keistimewaan, bisa segera di-*refocusing* disesuaikan kebutuhan riil lapangan dalam penanganan pandemi.

► Halaman 10

- Instan
1.
 2.
 3.
 4.

☐ Netral

☐ Biasa

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
☐ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Lampu Hijau...

"Memang saat ini sudah ada dana dari APBD yang ditransfer dari Kemendes, tapi tentu secara teknis tidak mencukupi di kalurahan yang kasusnya banyak. Dan di DIY ini ada 392 kalurahan," ujar Dukuh Kwagon, Sidorejo, Godean, Sleman itu.

"Saat ini, kebanyakan di tingkat padukuhan, yang belum tersedia adalah APD untuk pemulasaraan jenazah, dan perlengkapan disinfeksi rumah-rumah yang sedang dan selesai menjalani isolasi mandiri," ujarnya.

Namun lebih penting dari itu, dia berharap Pemda DIY segera mengonsultasikan mengenai petunjuk teknis dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum merealisasikan Danais sebagai dana publik yang difungsikan untuk penanganan pandemi.

"Ini penting agar Pemda terproteksi dari kasus hukum yang potensial muncul dalam penggunaan Danais," kata dia.

"Saya berharap dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan KPK, pejabat-pejabat di DIY bisa selamat, tidak tersangkut masalah di kemudian hari."

Sosiolog UGM, Arie Sujito, menyatakan dengan keluarnya surat bernomor S121/PK/2021 dari Kemenkeu Pemda DIY mestinya tidak lagi beralasan untuk ragu dalam pemanfaatan Danais dalam penanggulangan Covid-19. Sebab, Kemenkeu telah memberi lampu hijau lewat surat

tersebut. Hanya saja Pemda DIY mesti bergerak cepat untuk mencegah dan menanggulangi Covid-19.

"Makanya kebijakan yang diambil jangan lagi sama saat di masa normal. Harapannya bisa dilakukan secara cepat karena kondisinya kan darurat luar biasa. Dengan izin ini responsnya mesti cepat," kata Arie.

Ia juga menyarankan agar Pemda DIY menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam pemanfaatan Danais guna mempercepat penanganan Covid-19. Hal ini, menurutnya, penting agar ketersediaan ruang dan kapasitas penggunaan Danais bisa dioptimalkan dengan cepat untuk kebutuhan alat kesehatan dan sebagainya.

"Sekda dan Gubernur maunya bisa secara cepat memobilisasi sumber daya ini. Sukarelawan itu mesti didukung karena ini juga berkejaran dengan waktu agar ekonomi bisa kembali bangkit," ungkapnya.

Tunggu PMK

Sementara itu, Paniradya Pati Keistimewaan DIY, Aries Eko Nugroho, mengatakan dengan keluarnya surat tersebut Pemda DIY tinggal menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai panduan teknis pemanfaatan Danais untuk penanggulangan Covid-19. "Kalau perubahan jelas ada. Tapi seperti apa, itu kami menunggu dulu karena PMK-nya kan belum jadi, isinya seperti apa dan mekanismenya nanti bagaimana," kata Aries, Minggu.

Aries menerangkan nantinya setelah PMK baru turun Pemda DIY akan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Pemda DIY serta menginventarisasi kebutuhan yang mendesak dalam penanganan Covid-19 di DIY.

Setelah itu, pemanfaatan akan dioptimalkan untuk pencegahan serta penanggulangan Covid-19.

"Pandemi Covid-19 itu kan penyelesaiannya di APBD dan sumbernya bisa macam-macam salah satunya Danais. Konsepnya Pemda DIY seperti apa itu yang tahu Satgas Covid-19 DIY. Nah nanti mereka menunjuk kami di Danais untuk mengoptimalkan penanganan," katanya.

Ia menyebut semua dana yang bakal digunakan untuk penanggulangan Covid-19 di DIY mesti disatukan agar tidak membingungkan. Setelah itu baru diterjemahkan dengan kebijakan baru salah satunya lewat Danais.

"Ini penggunaan Danaisnya juga kita belum tahu bisa cepat atau tidak. Tapi semua kan ada prosesnya, misalnya dari Pemda DIY ke kabupaten/kota kemudian di kelurahan bagaimana," ujarnya.

Ia menambahkan dengan banyaknya organisasi sukarelawan di DIY, Pemda mestinya mampu memanfaatkan sumber daya itu dengan saling bekerja sama. Jangan sampai kerja-kerja birokrasi yang cenderung lamban dipertahankan di tengah situasi yang tengah genting. "Yang penting bisa akuntabel dan juga transparan," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005